

Perilaku Politik Elit Keagamaan dalam Politik Lokal

Mukhlis

Universitas Muhammadiyah Jember

Email: mukhlis_67@ymail.com

ABSTRACT This study aims to examine the variants of Muhammadiyah elite behavior associated with the Political Election of Banyuwangi. There are two questions which should be answered in this study. Firstly, what is the background of the political elite variants of Muhammadiyah in the local political elections? Secondly, what is the meaning of that behavior. The object of this study is position leader of Muhammadiyah. This study found that Muhammadiyah, in effort to consider the political situation, made reference to the Kepribadian Muhammadiyah document, which was contained the ideological guide for its followers. Yet, the elites of Muhammadiyah had pragmatic interest and political choice each one. However, every differentiation in political agenda must be guidance by rationality and moral values of Muhammadiyah.

Keywords: Political behavior, Muhammadiyah, Elit

ABSTRAK Kajian ini bertujuan mengungkap varian perilaku elit Muhammadiyah terkait dengan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan di Banyuwangi. Terdapat dua pertanyaan yang ingin dijawab dalam kajian ini. Pertama, apa yang melatarbelakangi beragam varian elit politik Muhammadiyah dalam pemilihan kepala daerah? Kedua, apa makna di balik perilaku elit Muhammadiyah tersebut. Unit analisis pada kajian ini adalah individu yakni anggota Muhammadiyah yang memiliki posisi sebagai pemimpin Muhammadiyah. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, Muhammadiyah dalam membaca persoalan politik lokal, berpijak pada dokumen Kepribadian Muhammadiyah yang di dalamnya terdapat panduan ideologis dalam menghadapi situasi politik. Kendati demikian, para elit Muhammadiyah terkadang memiliki kepentingan pragmatis masing-masing. Karena itu, di antara elit yang satu dengan yang lain, memiliki pilihan politik yang berbeda. Namun, perbedaan politik itu jelas, dalam koridor etis pilihan rasional dan nilai-nilai moral Muhammadiyah.

Kata Kunci: Perilaku politik, Muhammadiyah, Elit

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah sebagai mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat di daerah telah dijalankan sejak berlakunya undang-undang No. 32 tahun 2004. Masyarakat dilibatkan untuk menentukan arah pemerintahan daerah, melalui partisipasi pemilihan kepemimpinan daerah. Melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah terpilih diharapkan akan dirumuskan berdasarkan kebutuhan masyarakat, termasuk implementasinya. Adanya kebijakan-kebijakan publik yang menguntungkan masyarakat merupakan ujung dari perbaikan demokrasi lewat Pemilu Kepala Daerah (Marijan, 2007: 9).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau lazim disebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan bagian dari partisipasi politik masyarakat di dalam kegiatan politik. Partisipasi masyarakat dalam proses politik secara langsung memilih pimpinan di tingkat Kabupaten atau Wali Kota menjadi lebih bersemangat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung membawa konsekuensi tertentu terhadap hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Karena Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, maka Kepala Daerah lebih bertanggung jawab kepada yang memilih. Gubernur, Bupati dan Walikota yang dipilih langsung oleh rakyat merasa bukan merupakan bawahan dari pemerintah pusat. Situasi demikian kurang sesuai dengan semangat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita resmi Muhammadiyah No. 6 tahun 2009: 43)

Proses Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud partisipasi politik dengan kebebasan menggunakan hak politik setiap warga dan elit Muhammadiyah, menimbulkan perilaku politik yang beragam. Keberagaman pilihan politik memunculkan tarik ulur antara kepentingan politik personal, warga dan elitnya. Kecendrungan menarik lembaga Muhammadiyah terjun langsung

dalam politik atau tetap pada posisi sebagai gerakan Islam menjadi tarik ulur antara dua kepentingan tersebut. Sebagaimana dikutip (Suwarno, 2010: 149) bahwa,

“Perilaku politik Muhammadiyah, baik secara personal maupun kelembagaan sering terjadi tarik-ulur. Di satu segi menunjukkan kecenderungan terjun langsung dalam politik praktis dan di lain pihak, ingin tetap menjalankan fungsinya sebagai gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi mungkar yang lebih kultural, bukan sebagai partai politik.”

Sikap terbuka dalam Pemilihan Kepala Daerah memunculkan berbagai macam variasi dukungan dalam aspirasi pilihan politik, hal ini menjadi kajian menarik untuk diteliti secara mendalam, guna memahami perilaku politik elit Muhammadiyah dalam menentukan pilihan politik terkait Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi Jawa Timur. Kebebasan pilihan politik bagi anggota dan elit Muhammadiyah, akan disikapi dengan keragaman dukungan, sesuai kepentingannya. Masing-masing dukungan itu menimbulkan ketegangan dan perbedaan sikap, yang acap kali menimbulkan persinggungan pendapat di antara elit Muhammadiyah.

Variasi dukungan itu menuntut sikap kondusif untuk memformulasikan sikap kreatif, cerdas, visioner dan antisipatif dalam perubahan politik yang setiap saat berubah dengan cepat. Pilihan politik yang sarat dengan kepentingan masing-masing elit Muhammadiyah, dalam penilaian Maliki (2005) akan melahirkan persoalan tersendiri, jika Muhammadiyah direduksi sebagai instrumen politik atau dijadikan kendaraan politik, oleh elitnya untuk mengusung dan memenangkan calon pilihannya.

Apabila Muhammadiyah secara kelembagaan masuk wilayah tarik menarik politik oleh elit, dengan sendirinya watak Muhammadiyah, berubah menjadi watak politik yang hanya diperhitungkan jika menang dalam pilihan politik, akan tetapi jika gagal atau kalah dalam pilihan politik, Muhammadiyah akan dipinggirkan oleh kekuatan politik yang berkuasa (Maliki, 2005). Sedangkan dalam pandangan Ma’arif (2000), untuk menghindari tarik-menarik kepentingan politik, maka Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya atas pilihan politik itu kepada masing-masing warga dan elit Muhammadiyah, sepanjang tidak merugikan Islam.

Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan untuk menentukan sendiri pemimpin yang dianggap lebih cakap, jujur dan dapat dipercaya dengan mekanisme pemilihan langsung, telah dilaksanakan hampir di seluruh daerah di Indonesia, dengan segala konsekuensi dan persoalan yang muncul di dalamnya. Dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat, diharapkan Kepala Daerah yang terpilih akan lebih bertanggung jawab dan memihak kepentingan warga. Pemilihan Kepala Daerah juga ditujukan sekaligus untuk mendekatkan jarak antara pemimpin dan warga, sehingga pelayanan publik dapat disediakan dengan kualitas yang lebih baik (Topan, 2010: 15).

Pemilihan Kepala Daerah yang memilih Bupati dan Wakil Bupati, merupakan realitas sosial politik di tingkat lokal, yang tergolong baru dalam demokrasi lokal. Era politik baru menjadi bahan pendidikan politik bagi rakyat. Muhammadiyah sebagai bagian dari komponen masyarakat melalui pernyataan Pimpinan Daerah menegaskan bahwa, berpartisipasi dalam politik memerlukan kesadaran dan sikap yang mengedepankan kualitas, obyektifitas, nalar kritis, kejujuran nurani dan tanggung jawab kolektif yang tinggi (Pimpinan Daerah Muhammadiyah, 2005). Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah, Muhammadiyah secara kelembagaan menyerukan untuk menghormati kebebasan warga dan elit Muhammadiyah dalam melaksanakan hak politiknya secara jernih dan cerdas serta tidak membawa Organisasi Muhammadiyah kedalam kepentingan-kepentingan politik.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Banyuwangi 2010-2015 diikuti oleh tiga pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah di Banyuwangi. Pasangan urutan nomor satu adalah H. Abdullah Azwar Anas, M.Si. berpasangan dengan Yusuf Widiyatmoko, S.Sos. yang didukung oleh PDIP, PKB, PKS, dan PKNU. Bahasa sandi kampanye yang digunakan dengan istilah “DAHSYAT”. Pasangan urutan nomor dua adalah Ir. H. Jalal, M.Si. dan berpasangan dengan Drs. H. Yusuf Nur Iskandar, M.Hum. yang didukung oleh Partai Demokrat (PD) dengan bahasa sandi kampanye yang digunakan dengan istilah “LARIS”. Pasangan urutan nomor tiga adalah Hj. Emilia Contesa berpasangan dengan H. A. Zaenuri Ghazali, yang didukung oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Republikan, PKPB, Barnas, PNI Marhainis, PDP dan Patriot. Dengan bahasa sandi kampanye yang digunakan dengan istilah “EMIL-AZA” (Jawa Pos 21 April 2010).

Setiap warga di Banyuwangi yang mempunyai hak memilih bebas menentukan pilihannya sesuai keyakinan dan hati nurani, termasuk elit Muhammadiyah. Perilaku memilih yang obyektif, nalar kritis kejujuran dan kualitas partisipasi politik, menjadi sesuatu yang harus disosialisasikan dalam pendidikan politik bagi warga yang akan menggunakan hak pilihan politik. Jargon kampanye masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati yang berjanji mensejahterakan rakyat Banyuwangi menjadi daya tarik kampanye tersendiri dengan dukungan tim sukses masing-masing. Dukung-mendukung calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi sesuatu yang sulit dihindarkan dalam proses Pemilu Kepala Daerah.

Perilaku politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi tahun 2010-2015, setidaknya terdapat tiga dukungan yang diarahkan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati. Kelompok pertama adalah kelompok elit yang mengarahkan dukungannya kepada pasangan “LARIS” dengan alasan Ir. H. Jalal, M.Si. berasal dari keluarga Muhammadiyah dan bagian dari alumni SD Muhammadiyah Tegaldlimo Banyuwangi. Kelompok kedua adalah kelompok elit Muhammadiyah yang mengarahkan dukungannya kepada pasangan “DAHSYAT” dengan alasan calon pasangan ini lebih komunikatif dengan anak muda dan didukung oleh sebagian besar masyarakat Banyuwangi. Kelompok ketiga adalah kelompok elit Muhammadiyah yang mengarahkan dukungan kepada pasangan “EMIL-AZA” dengan alasan calon tersebut diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Masing-masing kelompok elit Muhammadiyah bergerak mempengaruhi warga di tingkat Cabang dan Ranting Muhammadiyah sesuai dengan kecerdasan dan caranya untuk mendukung dan memilih Bupati dan Wakil Bupati yang didukungnya. Kebebasan menggunakan hak politik dalam.

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah bagi elit Muhammadiyah, menjadi terabaikan pada saat kepentingan politik mempengaruhi proses Pemilihan Kepala Daerah berlangsung. Keragaman penyaluran aspirasi Pemilihan Kepala Daerah 2010-2015 di Banyuwangi bagi elit Muhammadiyah menjadi kajian menarik dengan kepentingan dan alasan yang berbeda dalam menentukan pilihannya.

Pilihan politik yang menimbulkan keragaman dukungan antar elit Muhammadiyah tersebut, akan dikaji lebih mendalam tentang perilaku politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2010 di Banyuwangi Jawa Timur.

Berdasar latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, apa yang mendasari keragaman perilaku politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah 2010 di Banyuwangi. *Kedua*, mengapa terjadi keragaman perilaku politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah 2010 di Banyuwangi. *Ketiga*, apa makna dibalik perilaku politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat diungkapkan bahwa studi ini dilakukan untuk memberikan kontribusi, baik secara teoretis maupun praktis tentang perilaku politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Dinamika Perilaku Politik Muhammadiyah

Dinamika perpolitikan Muhammadiyah pernah ditunjukkan dalam keanggotaan istimewa partai MASYUMI (1952), tulang punggung berdirinya partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) tahun 1967, membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN) tahun 1998, dan merekomendasi tampilnya kader terbaik untuk mencalonkan Presiden Indonesia 2004-2009 (Amien Rais) dengan dukungan penuh Muhammadiyah dan Organisasi otonomnya. Dinamika kehidupan politik yang digambarkan Muhammadiyah dapat ditelaah dalam penjelasan kepribadian Muhammadiyah :

“Muhammadiyah tidak buta politik, tidak takut politik, tetapi Muhammadiyah bukan Organisasi politik. Muhammadiyah tidak mencampuri soal-soal politik, tetapi apabila soal-soal politik masuk dalam Muhammadiyah ataupun soal-soal politik mendesak urusan agama Islam, maka Muhammadiyah akan bertindak menurut kemampuan, cara dan irama Muhammadiyah sendiri” (Weha, 2006: 59).

Hubungan Muhammadiyah dan Politik

Pertama, hubungan formal dan langsung (1937-1968). Keterlibatan Muhammadiyah yang bersifat formal dan langsung mulai dari MIAI (1937), PII (1938), Masyumi (1945), Parmusi (1968), menggambarkan hubungan yang erat dengan pengaruh positif dan negatif yang menyertainya. Hubungan tersebut juga memberikan inspirasi konseptual bahwa, kepemimpinan Muhammadiyah tahun 1937-1968, telah memberikan dasar-dasar partisipasi politik Muhammadiyah bagi elit dan anggotanya di pentas politik nasional. *Kedua*, hubungan netral dan menjaga jarak (1969-1995), Hubungan netral dan menjaga jarak dengan partai politik tersebut, oleh Muhammadiyah dibuat sebuah rumusan yang merupakan garis perjuangan yang dikenal dengan istilah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah. Kebijakan atau langkah organisasi itu diputuskan dalam Sidang Tanwir maupun dalam Muktamar Muhammadiyah antara lain: Khittah Ponorogo 1969, Khittah Ujung Pandang 1971, Khittah Surabaya 1978, Khittah Surakarta 1987.

Ketiga, hubungan personal dan non-formal (1996-2000), Pemberian kebebasan untuk aktif ke partai politik atau tidak aktif dalam partai politik, merupakan hak individu anggota dan pimpinan dalam penyaluran hak politiknya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan partai politik dalam kurun waktu 1996-2000 adalah bersifat personal dan non formal. *Keempat*, hubungan kooperatif, kritis dan korektif (2001-2010). Hubungan kooperatif, kritis dan korektif yang dijalankan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2000-2005 dan 2005-2010, terumuskan dalam putusan Tanwir di Denpasar 2002, putusan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2007 di Yogyakarta dan Putusan Muktamar 2010 di Yogyakarta. Konsep politik kebangsaan yang tertuang dalam Dokumen Resmi Organisasi Muhammadiyah adalah sebagai berikut: *Pertama*, : putusan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Denpasar 2002; *Kedua*, putusan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2004 di Mataram; *Ketiga*, putusan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2007 di Yogyakarta; *Keempat*, putusan Muktamar Muhammadiyah ke 46 tahun 2010 di Yogyakarta.

Muhammadiyah dan Demokrasi

Pemikiran Muhammadiyah yang bersentuhan dengan demokrasi dituangkan dalam sifat-sifat Muhammadiyah yang tercantum pada rumusan kepribadian Muhammadiyah. Konsep kepribadian Muhammadiyah lahir pada era kepemimpinan H. M. Yunus Anis (1959-1962). Diputuskan dalam Muktamar ke 35 di Jakarta tahun 1962, yang dikenal dengan Muktamar Setengah Abad Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah merupakan konsep yang menyangkut sifat-sifat Muhammadiyah yang menekankan Muhammadiyah kembali meneguhkan jati dirinya sebagai gerakan dakwah Islam dan tidak terpengaruh dengan cara-cara partai politik (Manhaj Gerakan Muhammadiyah, 2010: 367).

Kebijakan Muhammadiyah Menghadapi Pemilu dan Pilkada

Sikap Muhammadiyah dalam menghadapi pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dijelaskan dalam keputusan sidang pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2004) sebagai berikut: "*Pertama*, Muhammadiyah dengan seluruh komponennya berperan aktif dalam sosialisasi pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah, baik dalam memberikan pendidikan politik maupun dalam menentukan kualitas keberhasilan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah untuk kepentingan nasional melalui berbagai aktivitas di lingkungan Persyarikatan. *Kedua*, Muhammadiyah berharap agar pelaksanaan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung aman, damai, dan sukses. Segenap pihak diminta tidak dijadikan Pemilu dan Pilkada sebagai ajang konflik dan kekerasan. *Ketiga*, hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan setempat yang bersifat lokal sesuai dengan asas kepentingan Muhammadiyah secara nasional, kemasalahatan organisasi, serta situasi dan kondisi yang dihadapi diserahkan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah untuk mengambil kebijakan tertentu dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara menyeluruh dan penuh kearifan" (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2004).

Penegasan Sikap Politik Muhammadiyah

Penegasan sikap politik Muhammadiyah juga dituangkan dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara (PHIM, 2010) sebagai berikut: *Pertama*, warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik, melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip akhlak Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. *Kedua*, beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sesungguhnya, yaitu menunaikan amanat dan tidak boleh mengkhianati amanat, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran. Ketaatan kepada pemimpin sejalan dengan perintah Allah dan RasulNya, mengemban risalah Islam, menunaikan amar ma'ruf nahi munkar dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah.

Ketiga, berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama, serta tidak mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit. *Keempat*, para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (*uswah hasanah*) yang jujur, benar dan adil, serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah *fasad* (kerusakan) dan hanya mementingkan diri sendiri. *Kelima*, berpolitik dengan kesalehan, sikap positif dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi *amar ma'ruf dan nahi mungkar* yang tersistem dalam satu-kesatuan imamah yang kokoh. *Keenam*, menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik, yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa (PHIM, 2010: 87-89).

Diskusi Teoritis

Dalam studi ini, paling tidak, akan mengelaborasi tiga teori sosial yang relevan, yaitu teori tindakan sosial, teori elit (politik) dan teori perilaku (politik). *Pertama*, teori tindakan sosial (*social action theory*) dalam pandangan Parson (1951) dibedakan dalam dua orientasi penting, yaitu motivasi dan nilai individu yang bertindak. Tujuannya adalah untuk memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaan. Sedangkan dalam orientasi nilai, berhubungan dengan standar-standar normatif yang mempengaruhi dan mengendalikan pilihan-pilihan individu terhadap tujuan yang dicapai dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan itu (1951: 25). Parson menegaskan bahwa manusia secara individu, bebas dalam bertindak. Untuk tujuan pribadi, manusia boleh memilih salah satu dari pilihan dalam penentuan alternatif yang menjadi pilihannya (Parson dalam Robert, 1986: 106). Dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran pengorbanan dan keuntungan, yang saling mempengaruhi. Hubungan orang dengan orang lain, terjadi karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Teori ini memandang, hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Dalam konteks ini maka, teori tindakan sosial berkaitan erat dengan teori pertukaran sosial.

Kedua, teori elit yang digagas oleh teoretisi Mills (1956). Sarjana sosial ini memberikan pengertian bahwa, elit kekuasaan dikomposisikan dari orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan dari lingkungannya, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka berada diposisi pembuat keputusan yang memiliki konsekuensi besar. Mereka menempati posisi pimpinan strategis dari struktur sosial, seperti pimpinan partai politik atau keagamaan, di mana mereka menikmati kekuasaan, kekayaan, dan kemasyhuran.

Ketiga, teori perilaku politik (*political behavior theory*). Menurut Andrain (1992), tergantung pada interaksi antara aspek-aspek individual dan karakteristik-karakteristik situasi, seperti: persepsi, motivasi, tujuan, sikap, keterampilan dan pengetahuan (1992: 135). Perilaku manusia merupakan gejala yang dapat diamati. Pembahasan mengenai perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar, seperti: organisasi kemasyarakatan, kelompok elit, gerakan nasional atau suatu masyarakat politik. Perilaku manusia dalam pandangan Budiharjo (2010) berkaitan dengan sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan dan harapan (2010:75). Dari uraian di atas dapat dipersepsikan bahwa perilaku politik hanya salah satu dari keseluruhan perilaku manusia.

Metodologi

Beberapa bagian penting dalam metodologi yang perlu dijelaskan dalam studi ini adalah: *Pertama*, unit analisis dalam studi ini adalah individu elit yang menjadi pimpinan Muhammadiyah. *Kedua*, paradigma dalam penelitian ini adalah perilaku sosial yang lazim digunakan dalam studi sosiologi politik, yakni yang menekankan pada perilaku individu yang memiliki pilihan politik. *Ketiga*, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, untuk menghasilkan data diskriptif yang berupa kata-kata, makna, pengertian, konsep, nilai dari perilaku elit. *Keempat*, jenis penelitian adalah studi kasus untuk meneliti individu dalam perilaku politik khususnya elit Muhammadiyah. *Kelima*, teknik pengumpulan data dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi dan focus group discussion.

Keenam, lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, yang merupakan kota kabupaten ujung timur Pulau Jawa. Beberapa alasan yang mendasari dipilihnya lokasi penelitian ini karena selain mobilitas sosial ekonomi sangat tinggi, juga realitas sosial politik masyarakat Banyuwangi yang sangat dinamis. Alasan lain memilih lokasi penelitian di Banyuwangi Jawa Timur, karena para informan yang akan dijadikan sumber informasi dalam penggalian data penelitian tentang perilaku politik elit Muhammadiyah, cukup kompeten dan layak untuk dijadikan sumber data primer, maupun data pendukung dalam rujukan penelitian ini.

Kondisi Sosial di Banyuwangi

Kondisi Pendidikan, prioritas utama pendidikan di Banyuwangi sejak 2005 sampai sekarang adalah pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), untuk menyongsong wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia dan mewujudkan pendidikan vokasional. Guna mencetak tenaga-tenaga terampil yang siap bekerja, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah mewujudkan berdirinya Perguruan Tinggi Negeri (2012) dalam bentuk Politeknik.

Kondisi Sosial Budaya, dalam bidang sosial budaya yang menjadi daya tarik tersendiri adalah keragaman budaya dan adat istiadat di Kabupaten Banyuwangi. Upacara adat yang berkembang antara lain: bersih desa, ider bumi, petik laut, kebo-keboan, tolak balak, selamatan kuburan, baritan, cok bakalan, mantu kucing dan lain-lain. Selain itu upacara dalam hubungannya dengan kekerabatan antara lain: tingkeban, cuplak puser, mudhun lemah, ngruwat, ngebangi.

Kondisi Sosial Politik, wilayah administrasi Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 24 Kecamatan, 217 Desa/Kelurahan yang terdiri dari dengan jumlah dusun sebanyak 736, RW sebanyak 2.775 dan terdapat 10.177 RT. Pada perkembangan berikutnya perjalanan politik di Kabupaten Banyuwangi sangat kondusif yang ditopang oleh dukungan masyarakat dan aparaturnya yang profesionalisme dari aparaturnya pemerintah di tingkat Kabupaten sampai dengan di tingkat Desa/Kelurahan, penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Banyuwangi telah berjalan lancar. Pada saat itu jumlah pemilih dalam Pemilu Legislatif sebanyak 1.290.033 orang yang terdiri dari 636.187 orang laki-laki dan 653.846 orang perempuan, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 4.209 TPS.

Perjalanan Muhammadiyah Banyuwangi

Sejarah singkat Muhammadiyah di Banyuwangi, berawal pada tahun 1922-1923. Pada tahun-tahun tersebut, K.H. Ahmad Dahlan datang ke Banyuwangi, dengan maksud menyebarkan dakwah Islam dan Muhammadiyah. Pengajian umum diselenggarakan di dekat stasiun Kereta Api (KA) Banyuwangi yang dihadiri oleh masyarakat umum (Ilmi Nasri: 2002). Setelah pengajian agama disampaikan, K.H. Ahmad Dahlan memberikan kesempatan bertanya kepada semua yang hadir untuk mengajukan pertanyaan, seputar materi pengajian yang telah disampaikan, yakni materi ajaran Islam dan paham Muhammadiyah. Salah satu hadirin dengan nada keras menyampaikan pertanyaan di luar isi pengajian, yang intinya tidak sependapat dengan isi pengajian, yang telah disampaikan K.H. Ahmad Dahlan.

Ketidakpuasan salah satu hadirin dalam mengajukan pertanyaan dalam pengajian tersebut, memicu konflik kecil dan nada emosi dengan melontarkan kalimat hinaan kepada K.H. Ahmad Dahlan, dengan nada keras maupun sindiran. Misalnya; Dahlan kafir, Dahlan kalah, Dahlan Kyai palsu. (Ilmi Nasri: 2002). Perjalanan dakwah ke Banyuwangi menjadi pengalaman berharga bagi K.H. Ahmad Dahlan, untuk suatu ketika akan dilanjutkan pada perjalanan dakwah berikutnya. Beberapa hari setibanya di Yogyakarta, beliau menerima surat kaleng dari Banyuwangi, yang isinya berupa ancaman dan hinaan yang mengarah kepada pribadi K.H. Ahmad Dahlan, agar tidak datang lagi ke Banyuwangi. Jika Dahlan berani datang sekali lagi ke Banyuwangi akan disambut dengan pedang dan *klewang* serta istrinya akan dijadikan budak pelayan nafsu (Dokumen Pimpinan Daerah Muhammadiyah: 2009).

Periode sejarah Muhammadiyah Banyuwangi yang perlu dibidik adalah, era tahun 1998an. Pada awal Reformasi Politik Indonesia, di Banyuwangi pernah terjadi pembantaian guru ngaji, ulama' dan tokoh masyarakat, dengan isu dukun tradisional (dukun santet). Peristiwa ini berawal dari pembantaian terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet di Banyuwangi pada awal Februari 1998, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terlatih, berilmu tinggi dan terorganisasi, yang kemudian dikenal dengan sebutan "ninja". Disebut ninja, karena setiap aksinya mereka bertopeng ala ninja, dengan tutup kepala dan hanya matanya yang terlihat. Pakaian serba hitam, bertubuh kekar, sangat terlatih, menjadi ciri khusus kelompok tersebut. Pada awalnya pembantaian itu hanya ditujukan kepada orang yang terindikasi dukun santet, namun kemudian melebar kepada guru ngaji, ulama', tokoh masyarakat dan siapa saja yang dicurigai sebagai orang yang melindungi dukun santet. Hampir setiap hari mulai Februari 1998 sampai Oktober 1998 di Banyuwangi terdapat korban pembantaian yang dilakukan oleh ninja terhadap guru ngaji, ulama', tokoh masyarakat dan dukun santet. Menurut Tim Pencari Fakta (TPF) NU Banyuwangi selama 9 bulan peristiwa itu telah memakan korban pembunuhan sebanyak 147 orang.

Selanjutnya, sejarah bergulir pada situasi Muhammadiyah di tengah peristiwa politik lokal di Banyuwangi. Pada 2001-2002 terjadi konflik elit politik tingkat nasional, yang berpengaruh ke tingkat bawah. Konflik itu adalah elit politik yang mendukung Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dan pendukung ketua MPR Amien Rais menjelang peristiwa memorandum I, memorandum II sampai lengsernya Presiden di tahun 2002. Peristiwa ini dipicu oleh pernyataan-pernyataan elit politik nasional, baik dari elit PKB, pendukung Presiden, maupun pernyataan elit politik PAN (pihak oposisi) yang merupakan pendukung Amien Rais. Konflik politik elit ini membawa dampak konflik horizontal antar pendukung PKB dan PAN di Kabupaten Banyuwangi. Peristiwa politik konflik horizontal secara kelembagaan menyeret organisasi NU dan organisasi Muhammadiyah, mengingat PKB merupakan partai yang didirikan NU dan PAN adalah partai yang berdirinya di dukung oleh sebagian besar elit dan warga Muhammadiyah. Situasi politik lain yang perlu dijelaskan dalam studi ini adalah konflik politik Jama'ah Masjid NU dan Muhammadiyah di Kaligung., Konflik lokal antara warga Ranting Muhammadiyah dan Jama'ah Masjid NU Kaligung, dipicu oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan penentuan hari raya idul fitri 1 Syawal 1428 H.
2. Kumandang takbir dengan pengeras suara menyambut idul fitri sementara Masjid di sampingnya masih sholat tarawih.
3. Sholat idul fitri di halaman Mushola As-Salam, sementara umat Islam yang lain masih puasa ramadhan.
4. Sholat jum'atan yang diselenggarakan di Mushola As-Salam oleh warga Ranting Muhammadiyah yang berdekatan dengan Masjid NU Kaligung.
5. Selisih paham antar elit Muhammadiyah dan elit NU yang dipicu oleh kecemburuan sosial tentang kegiatan di masyarakat semisal pengobatan gratis, khitanan masal, penyaluran zakat, penyaluran daging Qurban yang dilaksanakan Ranting Muhammadiyah, sementara dari pihak Jama'ah Masjid NU belum melakukan hal yang serupa.

Adapun bentuk-bentuk ancaman yang ditujukan kepada warga Muhammadiyah Ranting Kaligung antara lain:

1. Penggalangan tanda tangan dari warga Jama'ah Masjid NU untuk mengusir salah satu elit Muhammadiyah dari Desa Kaligung.

2. Warga Muhammadiyah jika meninggal dunia tidak boleh dimakamkan di pemakaman umum Kaligung.
3. Turun ke jalan dengan pengerahan masa untuk menghalangi pelaksanaan sholat Jum'at di Mushola As-Salam jika warga Muhammadiyah tetap bersikukuh melaksanakan sholat Jum'at sendiri. (sumber dokumen PCM Rogojampi tertanggal 30 Oktober 2007 yang di tanda tangani oleh H. Adityawarman (ketua) dan Bahrul Rozi (sekretaris)).

Diskripsi Keterlibatan Elit Muhammadiyah dalam Politik, variasi bentuk keterlibatan elit Muhammadiyah dalam pilihan politik menggambarkan dinamika perpolitikan yang berkembang dari faktor internal dan faktor eksternal yang terus berdinamika. Perilaku politik elit yang kecenderungannya terus mengalami perubahan menandakan betapa tindakan politik elit yang sangat dinamis, disertai kedewasaan memilih dalam proses-proses pilihan politik. Pilihan-pilihan politik yang memerlukan tindakan cerdas, dewasa, dan keputusan politik yang tepat, adalah bagian dari perilaku politik elit. Keterlibatan elit Muhammadiyah dalam proses politik di pemerintahan lokal Banyuwangi, menurut para informan di lokasi penelitian adalah sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat lokal yang secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik tingkat nasional.

Perbedaan Perilaku Politik secara umum, organisasi Muhammadiyah telah mengambil kebijakan politik untuk menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan partai politik. Hal ini juga berlaku untuk momen pemilihan politik di tingkat lokal maupun nasional. Dikarenakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Banyuwangi 2010-2015 menjadi hak mutlak pribadi dalam menyalurkan aspirasi politik, maka keragaman pilihan politik elit atas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Banyuwangi menjadi sebuah keniscayaan.

Biarkan keragaman mengalir secara alamiyah dan pada akhirnya ditemukan kesepahaman politik, kesepahaman proses pilihan politik. Perilaku politik elit Muhammadiyah dalam hal menentukan pilihan politik, tidak mungkin dipaksakan sama. Hal ini akan lebih baik jika masing-masing elit mampu mengelola keragaman pilihan politik untuk menjadikan pembelajaran politik masa yang akan datang.

Tipologi Perilaku Politik

Perilaku Politik Aktif. Perilaku politik aktif yang dilakukan oleh elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi adalah sebagai berikut: *Pertama*, terlibat menjadi tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk turut serta mengkampanyekan visi dan misinya serta menyakinkan kepada masyarakat atas program-program untuk memajukan dan mensejahterakan Banyuwangi. *Kedua*, Mengajak warga dan pimpinan Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting untuk bersama-sama mendukung calon Bupati/Wakil Bupati yang diusungnya dengan tujuan untuk kepentingan Muhammadiyah yang lebih luas.

Ketiga, berbagai aktivitas dilakukan oleh elit Muhammadiyah yang berperilaku aktif ini, untuk sukses dukungan kepada pasangan Bupati/Wakil Bupati yang diusungnya seperti kegiatan jalan sehat bersama masyarakat, pengajian ahad pagi, kegiatan pengobatan gratis, bantuan sembako, pengajian kelompok-kelompok tani pedesaan, dan kunjungan ke masyarakat. *Keempat*, pertemuan-pertemuan khusus para tim sukses untuk merancang pemenangan Pemilihan Kepala Daerah selalu menjadi agenda rutin para elit yang berperilaku aktif guna memberikan dukungan maksimal dan optimal atas kerja tim sukses seperti: penjadwalan kerja tim sukses, sasaran kampanye tim sukses, target-target yang akan dicapai tim sukses, dan strategi yang digunakan tim sukses untuk mencari dukungan seluas-luasnya.

Kelima, pembagian tugas sesuai dengan kapasitas masing-masing individu elit yang berperilaku aktif untuk kerja sama dengan semua lapisan masyarakat, utamanya simpul-simpul masyarakat seperti: tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum pengusaha, profesi guru, TNI dan Polri untuk mendukung sepenuhnya pencalonan Bupati/Wakil Bupati yang diusungnya. *Keenam*, menghindari konflik-konflik lokal antar pendukung Bupati/Wakil Bupati untuk mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Ini dilakukan oleh elit Muhammadiyah yang berperilaku aktif juga untuk tujuan menjaga agar warga dan elit Muhammadiyah yang secara kebetulan pilihan politiknya berbeda tumbuh rasa penghormatan antar mereka. *Ketujuh*,

masing-masing elit Muhammadiyah yang berperilaku politik aktif ini, mempunyai komitmen untuk mampu mengantisipasi timbulnya persoalan yang muncul dalam Pemilihan Kepala Daerah, untuk tetap mengedepankan kepentingan Muhammadiyah yang lebih luas. Komitmen berikutnya adalah tidak menggunakan fasilitas Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sebagai tempat kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan tidak memakai atribut organisasi dalam kampanye serta tidak melibatkan organisasi Muhammadiyah sebagai sarana memperoleh dukungan dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Perilaku Politik Pasif, perilaku politik pasif yang dilakukan oleh elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi bertujuan: *Pertama*, menjaga hubungan baik dengan semua calon Bupati dan Wakil Bupati yang tampil dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan maksud siapa pun yang memenangi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah itu, Muhammadiyah tetap diperhitungkan sebagai mitra yang baik dalam mengelola pemerintahan daerah. *Kedua*, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga dan elit Muhammadiyah untuk menyalurkan aspirasi politiknya, sesuai dengan nuraninya masing-masing sekaligus upaya meredam konflik tarik menarik kepentingan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Ketiga*, menjaga warga dan elit Muhammadiyah agar tidak terjadi benturan kepentingan politik yang mengakibatkan renggangnya hubungan akibat perbedaan penyaluran aspirasi pilihan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Keempat, komitmen untuk tegas dalam mengawal kebijakan organisasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Khittah Perjuangan Muhammadiyah agar tidak terjadi perselisihan politik, tarik menarik kepentingan politik yang mengakibatkan melemahnya ukhuwah islamiyah dan menyurutkan kerja organisasi yang lebih utama. *Kelima*, menanamkan kedewasan politik pada warga dan elit Muhammadiyah bahwa keragaman pilihan politik itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga setiap momen pilihan politik warga dan elit Muhammadiyah tetap terjaga dari perpecahan dan sengketa politik yang berkepanjangan. *Keenam*, menghindari pemaksaan, intruksi dari atasan, tekanan politik adalah bagian dari pemberian keleluasaan para anggota menentukan pilihannya. Hal ini dimaksudkan untuk menekan konflik politik di tingkat cabang dan ranting dimana Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting adalah struktur yang langsung bersentuhan dan berhadapan dengan anggotanya.

Perilaku Politik Kreatif, perilaku kreatif yang dilakukan oleh elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi adalah sebagai berikut: *Pertama*, dukungan pilihan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah strategi dan taktik yang diberikan oleh elit Muhammadiyah yang berperilaku kreatif dengan maksud dirinya ikut membawa kepentingan mencalonkan diri dalam pilihan Legislatif tahun 2014. Dukungan yang diberikan kepada calon Bupati/Wakil Bupati dengan perhitungan politik yang dimaklumi bersama dan merupakan pengorbanan bersama. Kepentingan ini saling diketahui, saling disadari untuk memberikan kontribusi modal dukungan pada basis masa masing-masing. *Kedua*, pengaturan taktik dan strategi ini di pandang oleh elit yang berperilaku kreatif adalah sebagai bentuk kerja sama logis untuk sukses masing-masing kepentingan yang diharapkan. Sikap empatik, berjiwa saling mencari dukungan publik adalah bagian dari aktivitas politik pemberian dukungan yang dimaksudkan untuk kepentingan sukses dalam Pemilihan Kepala Daerah juga sukses dalam Pemilihan Legislatif. *Ketiga*, memahami peta politik lokal untuk sarana kampanye pemenangan kedua belah pihak dengan tetap mengkondisikan kepentingan bersama. Kerja maksimal dan optimal untuk sebanyak-banyaknya memperoleh dukungan dari masyarakat menjadi prioritas utama kedua belah pihak baik calon Bupati maupun calon Legislatif. Kepentingan masing-masing elit yang berperilaku kreatif dan calon Bupati/Wakil Bupati tersosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, utamanya di basis pendukungnya masing-masing.

Diskripsi Makna dibalik Perilaku Politik Elit Muhammadiyah

Makna Pemilu Kada bagi Elit Muhammadiyah, Pertama, menjadi sarana mendidik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan demokrasi lokal. *Kedua*, bagian dari tradisi birokrasi untuk menuju rotasi pengelolaan pemerintahan. *Ketiga*, bagian dari proses politik menuju demokrasi yang mendorong warga untuk berpartisipasi memilih calon pimpinan di

tingkat daerah. *Keempat*, sebagai partisipasi politik yang rasional bagi warga masyarakat.

Makna Kebijakan organisasi, persoalan keragaman pilihan memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati, menjadi hak mutlak masing-masing elit untuk menentukan sikap politiknya. Hal ini menjadi garis kebijakan organisasi dalam menyikapi tuntutan anggota yang akan menggunakan hak politiknya. Agar dikemudian hari tidak memunculkan persoalan politik yang berkepanjangan, maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyuwangi menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada semua jajaran pimpinan dan anggota tentang pernyataan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi menyangkut Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi. Salah satu butir pernyataan Pimpinan Daerah terkait Pemilihan Kepala Daerah itu menegaskan, “Bahwa kepada anggota atau elit Muhammadiyah yang terlibat tim sukses calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam Pemilihan 2010-2015 untuk tidak membawa nama Muhammadiyah, Organisasi Otonom, atribut, bendera dan fasilitas Persyarikatan dalam setiap kegiatan tim sukses”.

Makna Partisipasi Pilihan Politik

Paling tidak, terdapat tiga makna partisipasi politik, yaitu: *Pertama*, partisipasi pasif, artinya elit Muhammadiyah sangat komitmen dalam menjalankan pedoman organisasi untuk memberikan kebebasan warganya menentukan pilihan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Kedua, partisipasi aktif, artinya elit Muhammadiyah ambil peran-peran positif untuk terlibat langsung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2010-2015. Khittah Muhammadiyah di bidang politik dimaknai sebagai medan yang luas dan diterjemahkan bagian dari peran sosial politik Muhammadiyah.

Ketiga, partisipasi kreatif, artinya elit Muhammadiyah yang juga aktif di partai politik memainkan peran-peran ganda. Satu sisi untuk kepentingan Organisasi Muhammadiyah, dan di sisi lain kekuatan partai politik juga perlu dibangun untuk mendorong tampilnya kader-kader Muhammadiyah yang dapat ditampilkan dalam kepemimpinan dipemerintahan.

Makna Resiko Pilihan Politik

Resiko politik dari aktivitas Pilkada membawa daftar masalah yang panjang; memunculkan persoalan baru jika cara menyikapi proses politik ini kurang tepat. Dampak positif dan negatif dari Pemilihan Kepala Daerah ini selalu ada, baik persoalan berskala kecil maupun persoalan yang berskala besar. Realitas sosial yang berkembang dalam persoalan pilihan politik memilih calon Kepala Daerah hampir bisa dipastikan adanya persaingan atau perpecahan dikalangan elit, untuk berebut dukungan kepada masa dengan berbagai macam cara.

Hal semacam ini merupakan bagian dari resiko pilihan politik disegala medan pilihan. Misalnya pilihan Presiden, pilihan Gubernur, pilihan Bupati. Posisi dilematis pilihan politik bagi elit, baik berperilaku aktif, pasif, dan kreatif sama-sama berhadapan dengan resiko politik. Jika mendukung salah satu dari kandidat Kepala Daerah, maka menimbulkan masalah bagi kandidat yang lain.

Makna memilih kader potensial Muhammadiyah

Kader-kader Muhammadiyah yang berkemampuan menduduki pos penting dalam pemerintahan lokal/Kabupaten, perlu mendapat dukungan untuk ditempatkan dalam sirkulasi jabatan dipemerintah daerah. Tidaklah terlalu berlebihan jika sebagian elit dan warga Muhammadiyah berusaha dengan caranya untuk ikut ambil bagian dalam proses Pemilihan Bupati dan calon Bupati. Dukungan politik kepada pasangan “LARIS” dianggap oleh sebagian elit dan warga sudah tepat, karena selain keluarga lebih dekat kepada Muhammadiyah, juga karena Ir. Jalal merupakan alumni SD Muhammadiyah Tegaldlimo.

Sangat disayangkan jika kader potensial Muhammadiyah yang berkemampuan menduduki pos jabatan di pemerintahan daerah tidak terdukung dan bahkan terabaikan begitu saja, hanya karena beda politik dukungan. Upaya ini dilakukan untuk memberi kesempatan dan memberi mandat kepada yang berkemampuan untuk memberikan dukungan serius dengan

upaya maksimal untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Inilah perjuangan politik lewat Pemilihan Kepala Daerah.

Makna Pilihan Politik Elit dalam Perbedaan Kepentingan

Perbedaan perilaku politik elit sebagaimana dituturkan informan tersebut merupakan perwujudan dari pribadi elit yang memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan politik, sehingga perilaku memilihnya memiliki perbedaan kepentingan yang sangat beragam. Fakta sosial perilaku politik elit yang berbeda dalam kepentingan ini, menjadikan potensi bagi elit Muhammadiyah untuk mendewasakan diri dalam berperilaku politik yang rasional dan dapat membuktikan bahwa pilihan politik yang berbeda itu dipandang sebuah kewajaran proses berpolitik. Perbedaan kepentingan bagi elit Muhammadiyah menjadi sebuah penghormatan bagi elit yang lain, yang secara kebetulan pilihan politiknya tidak sama.

Perilaku Politik Elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pembahasan dilakukan melalui suatu analisis atau diskusi antara hasil penelitian dengan teori-teori yang digunakan antara lain: Teori Tindakan Sosial, Teori Pertukaran Sosial, Teori Elit, dan Teori Politik Elit, yang secara logis memberi jawaban terhadap rumusan masalah penelitian.

Perilaku Politik Elit sebagai Tindakan Sosial

Dari teori tindakan sosial ini dapat dianalisa bahwa keragaman pola perilaku politik elit Muhammadiyah dalam memilih Kepala Daerah di Banyuwangi 2010-2015, sebagaimana diungkapkan oleh para informan adalah sebagai berikut: a. para elit Muhammadiyah dalam menentukan pilihan politik bebas menentukan alternatif pilihannya, dengan memperhitungkan segala resiko yang timbul karena tindakannya., b. kepentingan-kepentingan yang ingin dituju dan dicapai sangat beragam tergantung pemahaman dan motivasi elit dalam menentukan pilihan politik., c. keragaman pilihan politik elit Muhammadiyah ini dipandang sebuah dinamika tindakan sosial yang berorientasi pada tujuan dan motivasi pelaku elit Muhammadiyah dalam menentukan pilihan politik., d. keragaman elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi juga dipengaruhi oleh karakter individu elit. Proses interaksi diri individu dalam dirinya dan interaksi dengan yang lain diluar dirinya. Masing-masing individu bertindak secara Subjektif mewakili dirinya, maka tindakan individu elit dalam menentukan pilihan politiknya menjadi berbeda. Hal ini dipandang sebuah kewajaran proses bertindak dan bersikap dalam aktivitas pilihan politik.

Elit Muhammadiyah dalam memahami perbedaan pilihan politik sejalan dengan teori tindakan sosial dikelompokkan:

Pertama, keragaman pilihan politik karena interaksi elit Muhammadiyah dalam keseharian individu elit dalam lingkungan dirinya maupun diluar dirinya. *Kedua*, keragaman pilihan politik karena karakter elit Muhammadiyah yang berbeda sebagai hasil dari bentukan proses interaksi. *Ketiga*, keragaman pilihan politik karena kepentingan individu mencapai tujuan yang diinginkan elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Keempat*, keragaman pilihan politik karena dinamika elit Muhammadiyah yang selalu berubah mengikuti era dan zamannya, seperti dinamika tindakan sosial, dinamika politik, dan dinamika pilihan politik. *Kelima*, keragaman pilihan politik karena pendidikan elit Muhammadiyah yang terus berkembang dalam dunia pemahaman, penerapan, pilihan, perubahan yang setiap waktu mengalami penyesuaian. *Keenam*, keragaman pilihan politik karena elit Muhammadiyah berbeda dalam memahami penerapan Khittah politik, sikap politik, perubahan sosial yang mengalami perkembangan sewaktu-waktu. *Ketujuh*, keragaman pilihan politik karena orientasi elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah sangat beragam sesuai dengan tujuan yang diinginkan masing-masing elit.

Dukungan politik elit sebagai pertukaran sosial

Dalam kaitan analisis pertukaran sosial bagi elit Muhammadiyah sehubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi 2010-2015 terdapat temuan-temuan sebagai berikut: *Pertama*, pertukaran sosial dipandang sebuah kewajaran proses politik antara yang didukung dan yang mendukung dalam aktivitas pilihan politik disegala tingkatan. *Kedua*, pertukaran sosial yang didalamnya terdapat unsur keuntungan, imbalan tidak harus berbentuk uang atau nilai tambah ekonomi; akan tetapi dapat berwujud saling memberi dukungan, janji jabatan, kepentingan kedekatan, kepentingan akses, kepentingan dakwah, kepentingan kemudahan. *Ketiga*, pertukaran sosial dari hasil dukung-mendukung pilihan politik memilih Kepala Daerah digunakan bagi elit Muhammadiyah di Banyuwangi untuk kepentingan yang lebih luas. Antara lain; pengembangan organisasi, pengembangan dakwah Islam, pengembangan amal usaha, penempatan kader-kader potensial Muhammadiyah dalam struktur pemerintahan di tingkat lokal. *Ketiga*, pertukaran sosial politik bagi elit Muhammadiyah yang aktif di partai politik dalam hal Pemilihan Kepala Daerah dimanfaatkan untuk saling mendulang dukungan warga untuk memilih, memberi kepercayaan tampil menjadi figure publik lewat pencalonan legislatif.

Keempat, pertukaran sosial bagi elit Muhammadiyah yang menjabat di pemerintahan atau PNS dalam hal Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi dimanfaatkan untuk melancarkan dan memperoleh jabatan yang lebih strategis untuk kepentingan mengambil peran-peran penting dalam pemerintahan di Banyuwangi. Kelima, pertukaran sosial yang saling memberi keuntungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Banyuwangi, tidak harus menyatu dalam satu dukungan pasangan calon. Boleh jadi para elit Muhammadiyah beragam dukungan kepada para calon Bupati dan Wakil Bupati di Banyuwangi untuk kepentingan pertukaran sosial yang lebih luas. Kecerdasan politik elit Muhammadiyah dalam hal ini sangat diutamakan.

Posisi Elit dalam Pilihan Politik

Pilihan politik elit tidak dapat disatukan, dipaksa, diharuskan, dan dibuat sama. Pemberian kebebasan elit dalam menentukan pilihan politik harus tunduk pada kebijakan yang telah diputuskan organisasi dalam Khittah Perjuangan dibidang politik. Artinya penyaluran aspirasi politik elit dalam pemilihan politik sudah diputuskan menjadi kebijakan yang berlaku bagi semua elit Muhammadiyah.

Pemilihan Kepala Daerah 2010-2015 bagi elit Muhammadiyah dipandang sebagai wujud partisipasi warga negara secara umum. Kekuatan elit, kepentingan elit, kebijaksanaan pribadi elit dan budaya politik elit menjadi salah satu penyebab perbedaan perilaku politik elit. Walaupun elit memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat dan sebagai actor yang mempunyai kekuasaan (Suzane Keller, 1995), tidak demikian halnya pada Organisasi Muhammadiyah. Elit Muhammadiyah posisinya sebagai pengatur, pengelola organisasi berdasar hasil putusan musyawarah. Sehingga kekuasaan elit dibatasi oleh aturan organisasi, sebagaimana diatur dalam AD/ART Muhammadiyah tentang kepemimpinan organisasi.

Bentuk Partisipasi Politik Elit dalam Pilihan Politik

Pater (1985), memberikan gambaran bahwa perilaku politik adalah tindakan individual dan kelompok dalam melakukan tindakan-tindakan politik individu, proses politik yang menyeluruh merupakan wujud dari perilaku politik. Sementara M. Brewster Smith (1968), menjelaskan perilaku politik sangat dipengaruhi oleh; lingkungan politik tak langsung, lingkungan sosial politik langsung, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu dan lingkungan sosial politik berupa situasi ketika melakukan kegiatan. Sedangkan Ramlan Surbakti (1992), berpandangan bahwa perilaku politik sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan penulis lewat wawancara dengan para informan diperoleh fakta bahwa perilaku politik elit terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah 2010-2015 di Banyuwangi, mengalami bermacam-macam kecenderungan yang senantiasa terdapat pilihan-pilihan, kebutuhan-kebutuhan, hasrat-hasrat, dan motif-motif. Hukum-hukum

penawaran dan permintaan bagaikan dinamika aktivitas pasar yang selalu muncul sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Perilaku politik elit Muhammadiyah semenjak kehadiran reformasi yang meluas dalam kehidupan masyarakat dan diiringi proses demokratisasi yang gegap gempita, memunculkan fenomena perubahan-perubahan orientasi politik sekaligus pilihan-pilihan politik dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Presiden maupun pemilihan legislatif.

Temuan Konsep Perilaku Politik Elit dalam Pemilihan Kepala Daerah

Temuan konsep perilaku politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah tersebut di atas berdasarkan data di lokasi penelitian, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) perilaku politik elit: *Pertama*, perilaku politik aktif; dalam hal ini elit Muhammadiyah secara aktif mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan rela menjadi tim suksesnya. Mengajak keluarganya dan orang lain termasuk warga Muhammadiyah di Cabang dan Ranting untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukungnya. Perilaku ini dilakukan karena ada harapan kepentingan yang lebih besar untuk Muhammadiyah masa yang akan datang. Kontrak dukungan politik ini dilakukan semata-mata memperjuangkan kepentingan dakwah Islam *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, dalam berbangsa dan bernegara lewat pengelolaan pemerintahan lokal Banyuwangi.

Fakta di lokasi penelitian para pelaku politik aktif dengan caranya melibatkan langsung menjadi tim sukses calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah 2010-2015. Aktif mengikuti pertemuan-pertemuan, penggalangan masa, aktif mensosialisasikan program-program calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukungnya, menggalang dukungan dari warga Muhammadiyah dan simpatisannya serta masyarakat umum. Bentuk-bentuk perilaku aktif bagi elit Muhammadiyah menurut para informan di lokasi penelitian dimaksudkan untuk tujuan yang lebih luas bagi kepentingan organisasi Muhammadiyah.

Kedua, perilaku politik pasif; yakni sikap yang ditunjukkan oleh para elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi dengan tidak mengajak orang lain untuk mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati. Memberikan respon yang sama kepada semua calon Bupati dan Wakil Bupati dengan tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Daerah. Tarikan kepentingan politik disikapi dengan sikap moderat, tanpa menunjukkan dukungan kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati secara terbuka. Memberikan respon positif kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersilahturahmi, mohon dukungan kepada Muhammadiyah. Berharap kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, untuk mendengarkan aspirasi Muhammadiyah jika terpilih, menerima amanat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Walaupun elit Muhammadiyah ini mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015, tetapi sifat dukungan memilikinya tidak secara terbuka. Perilaku ini ditampilkan untuk menjaga jarak yang sama antar semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Ketiga, perilaku politik kreatif; perilaku ini ditempuh oleh elit Muhammadiyah untuk saling memberikan dukungan atas diri elit dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Munculnya perilaku kreatif ini, karena kepentingan elit Muhammadiyah yang aktif di partai politik guna dukungan pencalonan dirinya dalam pemilihan calon Legislatif tahun 2014. Dukungan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2010-2015, dilakukan dengan pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga. Dibalik tindakan itu ada semacam kontrak politik yang dipahami bersama untuk saling berkorban, saling mendukung, saling melakukan pencitraan untuk kepentingan masing-masing. Peta politik dukungan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati dimanfaatkan elit Muhammadiyah untuk mencari simpati positif di masing-masing basis dukungan masa. Keterkaitan dukungan-mendukung ini sangat lekat dengan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak antara yang didukung dan yang mendukung.

Dari temuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku politik aktif, perilaku politik pasif, dan perilaku politik kreatif yang dilakukan oleh elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah mempunyai tujuan: (1) Membangun strategi politik elit, yakni perilaku elit yang beragam adalah bagian dari strategi dan taktik dalam membagi dukungan kepada pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati. (2) Mengatur distribusi politik elit, yakni keragaman pilihan politik elit dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. (3) Menciptakan bargaining politik elit, yakni keragaman pilihan politik elit ini dibangun agar siapapun yang memenangi Bupati dan Wakil Bupati, Muhammadiyah tetap mempunyai daya tawar tinggi dan tetap menguntungkan bagi perkembangan Muhammadiyah. (4) Mengajukan manuver politik elit, yakni keragaman pilihan politik bagi elit Muhammadiyah dipandang untuk mendewasakan, mencerdaskan, dan mematangkan elit Muhammadiyah dalam menyikapi dinamika kehidupan politik yang berubah setiap saat.

Analisis Implikasi Teoritik

Analisis Teori Tindakan Sosial (*Social Action Theory*)

Dari perspektif teori tindakan sosial Talcot Parson, dijelaskan bahwa tindakan memilih salah satu dari sejumlah pilihan adalah bagian dari tindakan manusia baik individu maupun kelompok setelah mengetahui terlebih dulu apa yang diinginkan. Subjek yang bertindak dalam setiap organisasi atau kelompok terdapat elit yang membuat berbagai tindakan keputusan. Tindakan tersebut menghasilkan ragam karakter yang berbeda sebagai hasil dari bentuk proses interkasi dalam diri individu maupun proses interaksi dari luar dirinya. Karakter perilaku tindakan itu selanjutnya, dibawa dalam penerapan tindakan menentukan, memilih, menyikapi persoalan-persoalan pribadi, persoalan kelompok, persoalan politik.

Data di lokasi penelitian terkait dengan teori tindakan sosial ternyata banyak menunjukkan pengukuhan terhadap prinsip-prinsip teori tersebut. Perilaku politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah ini sangat beragam karena elit sebagai individu atau kelompok memiliki makna-makna subjektif. Sejalan dengan pandangan Herbert Mead bahwa tindakan apapun dipandang sebagai tingkah laku yang dibentuk oleh diri pelaku sehingga menghasilkan karakter, tindakan yang berbeda. Tujuan dan keinginan individu yang ingin dicapai menjadi salah satu yang membentuk keragaman tindakan. Data di lokasi penelitian menunjukkan hal serupa, sehingga teori yang dikemukakan oleh Parson dan Herbert Mead sangat paralel dengan kondisi elit dalam Pemilihan Kepala Daerah 2010-2015 di Banyuwangi.

Analisis Teori Pertukaran Sosial (*Exchange Theory*)

Terkait dengan teori pertukaran sosial C. Homan yang menegaskan bahwa, dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Hubungan satu sama lain terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*). Para elit Muhammadiyah dalam perilaku politik memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, tidak terlepas dari unsur imbalan, pengharapan yang dijanjikan. Imbalan ini tidak harus berwujud uang, wujud lain dari imbalan yang dijanjikan adalah imbalan jabatan, imbalan dukungan, imbalan akses kedekatan dan imbalan kemudahan. Data di lapangan menunjukkan hal yang serupa dan kecocokan informasi dari para informan. Prinsip-prinsip teori pertukaran sosial sangat paralel dengan perilaku politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi, seperti dijelaskan dalam paparan analisis teori pertukaran sosial bahwa tindakan politik yang menyangkut imbalan, pengorbanan, dan keuntungan, tidak dapat dihindarkan dalam proses-proses pilihan politik.

Analisis Teori Elit (*Elite Theory*)

Selanjutnya dari sudut pandang teori elit yang digagas Charles W. Mills (1956) yang menegaskan para elit menempati posisi strategis dari struktur sosial dan dapat mempengaruhi publik dengan yang dimiliki, teori elit Suzanne Keller tentang elit yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat, sirkulasi elit yang berlangsung terus-menerus yang dikemukakan Pareto (1973), dinyatakan dalam penelitian di lokasi ternyata banyak menunjukkan pengukuhan dengan para elit Muhammadiyah di Banyuwangi.

Analisis Teori Perilaku Politik (*Political Behavior Theory*)

Perilaku memilih yang dikelompokkan sebagai perilaku aktif, perilaku pasif, dan perilaku kreatif adalah bagian dari partisipasi politik elit, yang oleh Charles F. Andrain disebut sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan dalam hal kekuasaan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat. Sementara dalam pandangan Mariam Budiharjo ditegaskan, bahwa tujuan yang dikejar-kejar oleh pelaku-pelaku politik adalah faktor kepentingan yang meliputi: kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan, dan budaya politik.

Munculnya perilaku politik elit dalam penegasan Surbakti (1992) disebutkan, bahwa elit sebagai individu maupun elit dalam kapasitas kelompok mempunyai arti subjektif, memiliki tujuan tertentu dan bukan sebagai perilaku yang lahir secara kebetulan. Berkaitan dengan pernyataan-pernyataan ilmuan-ilmuan politik di atas dan mendasarkan kenyataan di lokasi penelitian, mempunyai kesamaan dan menjadi pengukuhan terhadap prinsip-prinsip teori tersebut dalam upaya mengkaji perilaku politik elit Muhammadiyah di Banyuwangi.

Dari paparan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan dari implikasi teoritis berkenaan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan kontribusinya pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik. *Pertama*, pilihan politik yang dilakukan elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah tindakan individu elit yang bebas menentukan pilihan-pilihan politik yang dipengaruhi oleh tujuan, motivasi, dan keinginan individu. Hal ini memunculkan keragaman perilaku elit dalam mengambil keputusan politik memilih Kepala Daerah. Keragaman ini didukung oleh kenyataan data yang cukup akurat dari para informan, sehingga penelitian ini menemukan kategorisasi perilaku politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu perilaku aktif, perilaku pasif, dan perilaku kreatif. Kategorisasi perilaku elit tersebut menggambarkan dinamika elit dalam menyikapi pilihan politik. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu upaya memahami perbedaan pilihan politik elit Muhammadiyah yang menunjukkan bahwa keragaman pilihan politik itu menjadi sesuatu perbedaan yang tak terhindarkan.

Kedua, penelitian ini juga menemukan bukti-bukti bahwa para elit Muhammadiyah dalam menentukan pilihan-pilihan politik memilih Kepala Daerah, itu dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasional. Dukungan politik yang diberikan elit kepada para calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terlepas dari *reward*, *cost*, dan *profit*. Penemuan ini mendukung pandangan Homan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan dan keuntungan harapan dari dukungan politik itu agar diperoleh kedekatan hubungan dengan pemerintah untuk mengefektifkan kegiatan dakwah Muhammadiyah, kemudahan akses bantuan untuk mendukung Amal Usaha Muhammadiyah dan pemberian peran-peran penting kepada kader Muhammadiyah yang aktif dalam pemerintahan daerah. Atas dasar dukungan yang diberikan elit ada keterkaitan dengan ganjaran, pengorbanan dan keuntungan, maka sosialisasi efektif harus dipahami kepada warga agar tidak salah tafsir. Melalui hasil penelitian ini diharapkan membantu menjelaskan dan memahami posisi perilaku politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Ketiga, menyangkut kontribusi kajian ini pada pengembangan ilmu sosial, maka kajian yang memfokuskan perhatian pada perilaku politik elit Muhammadiyah ini ada relevansinya dengan teori tindakan sosial, teori pertukaran sosial, teori elit, dan teori perilaku politik. Dengan menggunakan metode penelitian sosial ditemukan makna yang mendalam dari perilaku politik elit dalam menentukan pilihan politiknya. Adanya perbedaan politik elit adalah kenyataan sosial yang selalu muncul dalam tindakan memilih dan selalu didukung oleh bukti-bukti yang tak terbantahkan. Elit Muhammadiyah baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok dalam menentukan pilihan-pilihan politik tetap mendasarkan pada rasionalitas yang dipertimbangkan dengan kedewasaan dan kecerdasannya. Hal ini mendukung pandangan Max Weber dan Parson bahwa tindakan sosial senantiasa didasari oleh rasionalitas pelakunya.

Keempat, dalam penelitian ini diperoleh data yang menunjukkan bahwa partisipasi politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah, secara bertanggung jawab ikut serta menyukseskan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang tertib dan aman di Banyuwangi. Hal ini dapat menjadi pengaruh pada publik untuk ikut berpartisipasi memilih pimpinan yang dikehendaki. Perilaku ini sangat relevan dengan yang ditegaskan Carles W. Mills (1956) bahwa

para elit dapat mempengaruhi publik atas aktivitas yang dilakukan dengan posisi yang dimiliki yang sangat strategis dari struktur organisasi. Dalam kajian sosiologis terciptanya situasi tertib dan aman dalam aktivitas sosial disebut keteraturan sosial dalam kehidupan kolektif. Peran politik elit Muhammadiyah dalam partisipasi politik ini, menjadi simbol kesadaran berpolitik bagi masyarakat. Dengan partisipasi politik yang ditunjukkan oleh elit Muhammadiyah dapat mencegah sifat apatis (masa bodoh) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Kelima, penelitian ini juga menemukan bukti-bukti bahwa perilaku politik elit Muhammadiyah yang bervariasi itu ternyata sebagai cara mencapai hal yang diinginkan dalam mewujudkan tujuan meraih kesuksesan menempatkan figure pimpinan yang didukungnya. Penemuan ini menyokong pandangan Carles F. Andrain bahwa partisipasi elit dalam perilaku memilih yang bervariasi itu adalah sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan dalam hal kekuasaan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat. Pandangan yang sama disampaikan oleh elit Muhammadiyah yang dijadikan sumber informasi bahwa penyebaran dukungan politik, keragaman pilihan politik yang diarahkan kepada semua figur calon Bupati dan Wakil Bupati itu sebagai sebuah strategi dan taktik untuk mencapai tujuan bahwa siapapun yang terpilih yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati, Muhammadiyah tetap diperhitungkan dan dapat mengambil peran-peran penting dalam pemerintahan daerah Banyuwangi.

Kesimpulan

Pertama, keragaman perilaku politik elit Muhammadiyah didasari oleh: - garis kebijakan Muhammadiyah tentang sikap politik berbangsa dan bernegara yang dituangkan dalam Khittah Perjuangan Muhammadiyah, yang menegaskan sikap Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dalam lapangan kemasyarakatan dan tidak dalam lapangan politik praktis, - sikap pernyataan politik Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Legislatif, - kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan-persoalan politik lokal yang terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah.

Kedua, terjadinya keragaman perilaku politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah disebabkan oleh: - pemahaman dan motivasi elit dalam mengikuti proses pilihan politik, - karakter individu elit dalam menyikapi setiap proses pilihan politik, - proses interaksi individu elit dalam dirinya dan interaksi dengan yang lain di luar dirinya, - kepentingan elit yang sangat beragam dalam tindakan proses pilihan politik, - persepsi masing-masing elit berbeda dalam menyikapi proses pilihan politik.

Ketiga, makna di balik perilaku politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah, antara lain: - keinginan memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang dapat membawa Banyuwangi yang lebih baik dengan memilih orang yang mengerti karakter masyarakat Banyuwangi, - menitikpkan kepentingan kepada Kepala Daerah terpilih atas gerakan dakwah Muhammadiyah di Banyuwangi, terutama keberlangsungan Amal Usaha Muhammadiyah baik bidang keagamaan, bidang pendidikan maupun bidang masyarakat, - menempatkan kader-kader terbaik Muhammadiyah dalam proses pengelolaan pemerintahan lokal Banyuwangi lewat Bupati dan Wakil Bupati terpilih, - pengaturan taktik dan strategi politik lokal yang dilakukan elit Muhammadiyah dalam penyebaran dukungan kepada para calon Bupati dan Wakil Bupati, agar diperoleh kemanfaatan bagi organisasi Muhammadiyah, bahwa siapapun Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, organisasi Muhammadiyah tetap diperhitungkan sebagai penyumbang dukungan, - hubungan Muhammadiyah dengan para calon Bupati dan Wakil Bupati (yang terpilih atau tidak terpilih) tetap menjadi hubungan baik dan berkelanjutan, elit Muhammadiyah memandang persoalan kalah atau menang dalam proses politik menjadi sebuah kewajaran untuk disadari bersama, bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati 2010-2015 yang didukung oleh mayoritas masyarakat Banyuwangi.

Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi. (2010). "Peran Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Kebangsaan," Suara Muhammadiyah, No. 2 Th. ke 95, 16-31 Januari 2010.

- Azra, Azyumardi. (2010). "Political Disengagement," *Suara Muhammadiyah*: No. 11 Th. ke 95, 1-15 Juni 2010.
- Budiharjo, Mariam. (1998); (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Homans, Goerge. (1961). *Social Behavior: Its Elementary Forms*. New York: Brace & World.
- Homans, Goerge. (1967). *The Nature of Social Science*. New York: Hoar Court Brace & World.
- Huda, Miftahul. (2007). *Ikhwanul Muhammadiyah: Benturan Ideologi dan Kaderisasi dalam Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Jawa Pos, 21 April 2010.
- Johnson, Doyle Paul. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang cetakan pertama. Jakarta: Gramedia.
- Johnson, Doyle Paul. (1990). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern jilid II*, diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang cetakan kedua. Jakarta: Gramedia.
- Jones, Pip. (2009). *Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga post modernisme*, alih bahasa Ahmad Fedyani Saifudin, edisi satu. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Karim, M. Rusli. (1985). *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Hanindita.
- Keller, Suzane. (1995). *Penguasa dan Kelompok Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khittah. (2004). *Rekomendasi Sidang Tanwir Muhammadiyah Mataram*. Nusa Tenggara Barat 3-5 Desember 2004.
- LHKP. (2010). *Membangun Kontruksi Ideal Relasi Muhammadiyah dan Politik*, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur : MATAN April 2010.
- Luth, Thohir. (2011a). *Menyelamatkan Muhammadiyah*. Surabaya: Hikmah Press.
- Luth, Thohir. (2011b). *Syari'at Islam, Mengapa Takut*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Luth, Thohir. (2012). "Penegasan Muhammadiyah," *Majalah MATAN*: edisi 66 Januari 2012.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (1987). *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (1995). "Muhammadiyah Menjelang Satu Abad," *Harian Republika*, 9 Juni 1995.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (1997). *Islam, Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (2000a). *Masa Depan Bangsa dalam Taruhan*, cetakan pertama Mei 2000. Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (2000b). *Independensi Muhammadiyah di tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*, cetakan pertama. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (2011). *Pengantar Potret Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (2012). "Penyebab Utama Kepemimpinan Nasional yang Lemah," *Majalah MATAN*, Edisi 66 Januari 2012.
- Maliki, Zainuddin. (2005a). *Islam Varian Rasio dalam Diskursus Cendekiawan*, cetakan pertama Juni 2005. Malang: Bayumedia Publishing.
- Maliki, Zainudin. (2000). *Agama Rakyat Agama Penguasa: Kontruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, cetakan kedua 2001. Yogyakarta: Galang Press.
- Maran, Rafael Raga. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, cetakan pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marijan, Kacung. (2007). *Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik, dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID).
- MATAN, Januari 2012.
- MATAN, Mei 2013.
- Moleong, Lexy J. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- MPK, (2010). *Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah dan Langkah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Mul Khan, Abul Munir. (1990). *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, cetakan pertama. Jakarta: Bumi Aksara.

- Mulkhan, Abul Munir. (2000). *Menggugat Muhammadiyah, cetakan pertama Juli 2000*, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.
- Mulkhan, Abul Munir. (2010). *Marhaenis Muhammadiyah, Gerakan Muhammadiyah di Pedesaan*, cetakan pertama 2010. Yogyakarta: Galang Press.
- Najib, Muhammad. (1998). *Amien Rais Sang Demokrat*, cetakan pertama Juli 1998. Jakarta: Gema Insani Press.
- Narwoko, Dwi J. dan Bagong Suyanto. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, edisi ketiga, cetakan keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nashir, Haedar. (2000). *Dinamika Politik Muhammadiyah*, cetakan pertama Maret 2000. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Nashir, Haedar. (2000). *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*, cetakan pertama Januari 2000. Yogyakarta: Tarawang.
- Nashir, Haedar. (2000). *Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah*, cetakan pertama Maret 2000. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Nashir, Haedar. (2010). *Khittoh di tengah Perubahan Politik*, Bag: 3 Suara Muhammadiyah: No. 12 Th. ke 95, 16-30 Juni 2010.
- Nasri, Imron. (2011). *Saya Seorang Demokrat, Percik-Percik Pikiran Amien Rais*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Pambudi, Himawan S. dan Siti Fikriyah. (2003). *Menuju Demokrasi Terkonsolidasi*, cetakan pertama 2003. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Pareto, Vilfredo. (1973). *The Circulation of Elites, dalam Amitai Etzioni, Social Change Sources, Patternes and Consequences*. New York: Basic Books, Inc. Publishers.
- Parson, Talcot. (1951). *The Social System*. New York and London: The Free Press and Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Pater, David E. (1985). *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta : LP3ES.
- PHIM. (2000). *Keputusan Muktamar ke-44 di Jakarta*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Berita Resmi Muhammadiyah No. 6 Tahun 2009." Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (1971). *Himpunan Keputusan-Keputusan PP. Muhammadiyah*. Yogyakarta: PPM.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (1996a). *Kepribadian Muhammadiyah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (1996b). *Pedoman Bermuhammadiyah*, Yogyakarta : BPK dan Pembinaan AMM PP. Muhammadiyah.
- Pleno PPM dan PWM. (2004). *Kebijakan Muhammadiyah Menghadapi Pemilu 2004*. (Tidak Diterbitkan)
- Smith, M. Brewster. (1968). "A Map for the Analysis of Personality and Politics," *Journal of Issues*, Vol. 24, No. 3 dalam Teori-Teori Politik P. Anthonius Sitepu (2012).
- Suara Muhammadiyah No: 05/Th. ke 83, 1-15 Maret 1998 hlm 40-42.
- Suara Muhammadiyah No: 09/Th. ke 83, 1-15 Mei 1998 hlm 28.
- Suara Muhammadiyah No: 12/ Th. ke 95/16-31 Januari 2011.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan kelima. Bandung: Alfabeta.
- Sujarwanto. (1999). *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan, Sebuah Dialog Intelektual*, cetakan pertama Desember 1990. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Supardan, Dadang. (2009). *Pengantar Ilmu Sosial sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, cetakan kedua Juni 2009. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Suryadi, Syamsu. (1993). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suwarno. (2001). *Muhammadiyah sebagai Oposisi Perubahan Perilaku Politik Muhammadiyah 1995-1998*. Yogyakarta: UII Press.
- Suwarno. (2010). *Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara, Kontribusi Muhammadiyah dalam perspektif Sejarah*, cetakan pertama Juni 2010. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syamsudin, Din. (1990). *Muhammadiyah Kini dan Esok*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

- Syamsudin, Din. (1993). *Beberapa Catatan Kritik di Sekitar Usaha Pencarian Konsep tentang Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Ulumul Qur'an.
- Syamsudin, Din. (2009). "Muhammadiyah dan Dialog Pemikiran," *Suara Muhammadiyah*, No. 6 Th. ke 93 Maret 2009.
- Syamsudin, Din. (2010). *Islam dan Politik*. Jakarta: Logos.
- Syamsudin, Din. (2012). "Spiral Immorality di Tubuh Publik," *Majalah MATAN*, edisi 66 Januari 2012.
- Weha, Agus. (2006). *Potret Keagamaan Politik Muhammadiyah*. Malang: UMM Press.
- Wirawan, Ida Bagus. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yin, Robert K. (1996). *Studi Kasus: Desain dan Metode* (Penerjemah M. Djauzi Mudzakir). Jakarta: Raja Grafindo Persada.